IMPLIKASI TINDAKAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Annisa Salsabila, Achmad Yasin, Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

salsaabilanis234@gmail.com

surahyasin@uinsa.ic.id

imron_mustofa@uinsa.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengulas tentang keterkaitan tindakan sosial dalam pengelolaan zakat perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi teori tindakan sosial Max Weber terhadap pengelolaan zakat. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat merupakan konsep yang penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Zakat, sebagai kewajiban agama bagi umat Muslim yang mampu, memiliki dimensi sosial yang kuat dalam Islam. Dalam konteks pengelolaan zakat, tindakan sosial mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga penggunaan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial dalam Masyarakat. Pengumpulan zakat harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, dengan memastikan bahwa dana zakat terkumpul dari sumber yang halal dan disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak menerimanya. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup berbagai aspek yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Ada beberapa tindakan sosial yang relevan dalam pengelolaan zakat. Dalam Pendidikan dan sosialisasi yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan ketentuan-ketentuannya melalui berbagai media, ceramah, dan seminar. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain yaitu bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan sosial dalam pengelolaan zakat menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa tindakan sosial dalam pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip keadilan dan kesetaraan dengan melakukan distribusi yang adil dan pendataan yang tepat. Dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan pelaporan yang jelas dan pengawasan public. dalam prinsip efisiensi dan efektivitas dengan penggunaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan tindakan sosial ini dalam kerangka hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Tindakan sosial, pengelolaan zakat, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

This article reviews the relationship between social action in the management of zakat from a sharia economic law perspective. This research aims to analyze the implications of Max Weber's social action theory for zakat management. Social action in managing zakat is an important concept from the perspective of sharia economic law. Zakat, as a religious obligation for well-off Muslims, has a strong social dimension in Islam. In the context of zakat management, social action covers various aspects, from collection, distribution, to the use of zakat funds to help those in need and improve social welfare in society. Zakat collection must be carried out with transparency and accountability, by ensuring that zakat funds are collected from halal sources and distributed appropriately to those who are entitled to receive them. Social actions in zakat management include various aspects involving the community,

government and non-governmental organizations. There are several social actions that are relevant in managing zakat. In education and outreach, namely to educate the public about the importance of zakat and its provisions through various media, lectures and seminars. Collaboration with the government and other institutions, namely collaborating with the government and the private sector in poverty alleviation and community empowerment programs. From the perspective of sharia economic law, social action in managing zakat emphasizes the principles of justice, transparency and accountability to achieve sharia goals which include the maintenance of religion, soul, mind, lineage and property. Several social actions in managing zakat are based on sharia economic principles. In the principles of justice and equality by carrying out fair distribution and appropriate data collection. In the principles of transparency and accountability with clear reporting and public supervision. in the principles of efficiency and effectiveness with the use of technology and economic empowerment. By implementing these social actions within the framework of sharia economic law, zakat management can be more effective in achieving its main goals, namely helping those in need, reducing socio-economic inequality, and improving the welfare of society as a whole.

Key words: Social action, zakat management, sharia economic law

PENDAHULUAN

Zakat sebagai kewajiban keagamaan dalam Islam, memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Keterkaitan tindakan sosial dalam pengelolaan zakat sangat penting. Ada beberapa aspek dalam keterkaitan tersebut. Dalam distribusi pendapatan yang berkeadilan dengan mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹ Zakat dapat meningkatkan daya beli Masyarakat pada Tingkat ekonomi bawah, serta meningkatkan kapasitas produksi bagi para pengusaha. Hal ini berimplikasi pada distribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Lalu dalam pengangguran dan kemiskinan, pengelolaan zakat dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan memberikan bantuan ekonomi dan sosial yang lebih efektif. Zakat dapat membantu meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam solidaritas sosial, zakat memiliki dimensi sosial yang kuat memperlihatkan solidaritas sosial dan pernyataan rasa kemanusiaan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya membantu sesama dan meningkatkan kesetiapannya dalam Masyarakat.

Selanjutnya, pengembangan Lembaga pengelola zakat yaitu dengan memerlukan lembaga yang spesifik dan berwenang, seperti BAZNAS, untuk mengelola zakat secara efektif. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan hukum agama dan perundang-undangan. Dalam evaluasi dan perbaikan, pengelolaan zakat juga

¹ Ridlo, Ali, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl," 6, no. 2 (2013): 5.

memerlukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan zakat. Dalam solidaritas sosial, zakat memiliki dimensi sosial yang kuat, memperlihatkan solidaritas sosial dan pernyataan rasa kemanusiaan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya membantu sesama dan meningkatkan kesetiapannya dalam Masyarakat.

Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan satu kali sesuai dengan penjelasan undang-undang, sedangkan zakat yang bersifat produktif merupakan zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif. Zakat merupakan kewajiban agama, dalam hukum ekonomi syariah kewajiban untuk membayar zakat diatur oleh prinsip-prinsip agama islam yang mendasari system ekonomi. Salah satu tujuan utama zakat dalam hukum ekonomi syariah adalah redistribusi kekayaan. Zakat mengharuskan individu yang mampu untuk memberikan Sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memperkuat solidaritas.

Zakat juga memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam hukum ekonomi syariah, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya kepada Masyarakat yang kurang mampu, sehingga membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi. Zakat juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dalam hukum ekonomi syariah. Dengan mengalirkan dana zakat ke dalam ekonomi, zakat membantu mengurangi tekanan ekonomi bagi mereka yang berada dalam kondisi finansial yang sulit, serta meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan.

Dalam hukum ekonomi syariah, tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah mencapai kesejahteraan sosial. Zakat berperan dalam mencapai tujuan ini dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dalam masyarakat. Pengelolaan zakat dalam hukum ekonomi syariah juga mencakup pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat, individu merasa terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang kuat dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan ekonomi syariah memperluas manajemen zakat lebih efektif melalui LAZ (lembaga amil zakat) yang bersifat organisasi dan terjamin akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan

METODE

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini mengacu pada metode ilmiah yaitu menggunakan analisis dokumen tertulis, seperti laporan, surat kabar, atau dokumen resmi lainnya. Hasil dari menganalisis dokumen tertulis didekati dengan kualitatif menggunakan pendekatan ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

MEMAHAMI TINDAKAN SOSIAL TEORI MAX WEBER

Max Weber mengembangkan teori tindakan sosial dalam karyanya yang terkenal, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" dan juga dalam karya-karya lainnya. Teori ini merupakan salah satu kontribusinya yang paling berpengaruh dalam sosiologi. Weber menekankan bahwa perilaku manusia tidak selalu dapat dijelaskan dengan cara ilmiah tradisional yang berfokus pada sebab-akibat fisik atau biologis. Sebaliknya, dia memperkenalkan konsep tindakan sosial, yang merupakan tindakan individu yang memiliki makna subjektif, terutama yang diilhami oleh norma, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Seorang bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan orang lain.²

Dalam konsep tindakan sosial, Weber membaginya menjadi empat jenis tindakan: Tindakan rasional secara instrumental: Tindakan ini terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Contohnya adalah ketika seseorang bekerja untuk mendapatkan uang, Tindakan rasional secara nilai: Tindakan ini didasarkan pada keyakinan atau nilai-nilai tertentu. Misalnya, seseorang mungkin memilih pekerjaan yang membayar lebih rendah tetapi sesuai dengan nilai-nilai moral mereka, Tindakan afektif: Tindakan ini dipengaruhi oleh emosi atau perasaan individu. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan sumbangan karena merasa kasihan pada orang yang membutuhkan, dan Tindakan tradisional: Tindakan ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Misalnya, mengikuti adat dalam upacara pernikahan.

Weber juga memperkenalkan konsep "tipologi tindakan sosial" yang mengklasifikasikan tindakan sosial berdasarkan kombinasi dari empat jenis tindakan yang telah disebutkan di atas. Dengan teori ini, Weber memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk memahami perilaku manusia dalam konteks sosial dan budaya mereka, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi tindakan individu dalam masyarakat. Tindakan sosial adalah sebuah tindakan yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain dalam interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan antara dua

² D R I B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Jakarta: kencana, 2012).

individu atau lebih yang saling mempengaruhi. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang didasarkan pada tujuan yang jelas, nilai-nilai dasar, perasaan, atau kebiasaan yang telah mendarah daging.

Tindakan sosial dibagi menjadi beberapa jenis tindakan sosial instrumental yang didasarkan pada tujuan yang jelas, tindakan sosial nilai yang berorientasi pada sistem nilai tertentu, tindakan sosial rasional yang mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan, dan tindakan sosial afektif yang ditandai dengan perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Contoh tindakan sosial dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam kegiatan upacara adat, dalam berbagai tradisi, atau dalam kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi orang lain.

TINDAKAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

zakat dalam terminologi syariah diartikan sebagai kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam delapan asnaf.³ Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat dengan tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Tindakan sosial pertama dalam pengelolaan zakat adalah melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan bagaimana dana zakat akan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tindakan sosial berikutnya adalah mengumpulkan dana zakat dari individu, perusahaan, atau lembaga lainnya yang mampu. Ini melibatkan pengorganisasian program pengumpulan dana, baik melalui donasi langsung, program otomatis, atau metode lainnya.

Setelah dana zakat terkumpul, tindakan sosial selanjutnya adalah menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Ini melibatkan identifikasi individu atau keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan zakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hukum Islam. Tindakan sosial berikutnya adalah mendistribusikan dana zakat kepada penerima yang memenuhi syarat. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyaluran langsung kepada individu, bantuan ke lembaga amil zakat, atau proyek-proyek pembangunan sosial. Sebagian dana zakat juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok

³ Azharsyah Ibrahim., "Azharsyah Ibrahim. (2011). Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Syariah.*" (2011).

yang kurang mampu, memberikan pelatihan keterampilan, atau mendukung program-program pengembangan usaha kecil dan menengah.

Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat juga mencakup penyediaan pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan perumahan, dan lain sebagainya. Tindakan sosial terakhir dalam pengelolaan zakat adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif dan tepat sasaran. Ini melibatkan pemantauan terhadap proyek-proyek yang didanai oleh zakat dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat penerima. Dengan melakukan serangkaian tindakan sosial ini dalam pengelolaan zakat, diharapkan dapat menciptakan dampak yang positif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Antara tindakan sosial dan pengelolaan zakat sangatlah erat karena zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Tindakan sosial dimulai dengan pengumpulan dana zakat dari individu atau kelompok yang mampu. Proses ini melibatkan tindakan sosial seperti kesadaran akan kewajiban agama, empati terhadap yang membutuhkan, dan keinginan untuk memberikan bantuan kepada sesama. Distribusi zakat dilakukan dengan prinsip-prinsip sosial seperti keadilan, solidaritas, dan empati. Pengelolaan zakat yang efektif memastikan bahwa dana didistribusikan secara adil kepada yang membutuhkan, tanpa diskriminasi atau favoritisme.

Pengelolaan zakat yang baik mencakup penggunaan dana untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Ini dapat dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya yang membantu orang-orang untuk mandiri secara ekonomi. Salah satu tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan menggunakan dana zakat untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi kemiskinan, pengelolaan zakat berperan dalam tindakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan zakat juga dapat memberdayakan secara sosial dengan memberikan akses kepada pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pengelolaan zakat yang transparan dan adil, tindakan sosial solidaritas dan keadilan sosial diperkuat. Ini menciptakan rasa persatuan dan saling peduli antar anggota masyarakat. Pengelolaan zakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat juga merupakan tindakan sosial. Ini membangun kesadaran kolektif tentang masalah sosial dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian,

keterkaitan antara tindakan sosial dan pengelolaan zakat mencerminkan bagaimana zakat bukan hanya merupakan aspek keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang kuat dalam memperkuat solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.⁴

KONSEP TINDAKAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT.

Konsep tindakan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang berpusat pada membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Konsep utama dalam tindakan sosial dalam pengelolaan zakat adalah empati dan keprihatinan terhadap kondisi mereka yang membutuhkan. Ini melibatkan pengakuan akan penderitaan orang lain dan keinginan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar dalam pengelolaan zakat. Semua individu yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk menerima bantuan zakat tanpa diskriminasi atau favoritisme.

Konsep transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan zakat. Ini melibatkan pengungkapan yang jelas tentang penggunaan dana zakat, termasuk bagaimana dana dikumpulkan, dialokasikan, dan disalurkan, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan, distribusi, dan pengawasan dana zakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program zakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Konsep pemberdayaan ekonomi juga relevan dalam pengelolaan zakat. Selain memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, pengelolaan zakat juga dapat mencakup memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau dukungan lainnya untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi.

Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat dapat diarahkan pada pendekatan holistik terhadap kesejahteraan sosial. Ini berarti tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menyediakan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan oleh penerima zakat. Pendekatan holistik dalam pengelolaan zakat mengacu pada pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat untuk mencapai dampak yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

Pendekatan holistik dimulai dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat penerima zakat. Ini mencakup identifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, masalah kesehatan, dan

⁴ Andri Maulana and Rio Laksamana, "Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (n.d.).

lain-lain. Pendekatan holistik mengintegrasikan berbagai program dan proyek yang berbeda dalam pengelolaan zakat untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari masyarakat penerima zakat. Ini termasuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Pendekatan holistik mempromosikan kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai sumber daya dan keahlian untuk digabungkan guna mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan holistik melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan zakat. Masyarakat penerima zakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program yang mereka terima, sehingga lebih relevan dan berdampak dalam konteks lokal mereka. Pendekatan holistik memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan zakat. Ini mencakup pengembangan program-program yang tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas dan resiliensi masyarakat untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Pendekatan holistik mengakui pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program zakat. Ini membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien, serta memungkinkan pembelajaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan program di masa depan.

Pendekatan holistik dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang menyeluruh terhadap masyarakat penerima zakat. Ini mencakup memberikan akses kepada pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, modal usaha, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Dengan menerapkan pendekatan holistik dalam pengelolaan zakat, diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.⁵

Konsep kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, juga penting dalam pengelolaan zakat. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan dampak dari program-program zakat.

1. Lembaga amil zakat dapat membentuk kemitraan dan kerja sama antara satu sama lain untuk mengoptimalkan pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat. Ini dapat menghasilkan skala ekonomi, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat.⁶

⁵ Didin Hafidhuddin and Budi Handrianto, *Agar harta berkah dan bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

⁶ *Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, n.d.

2. Kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas, keberlanjutan, dan dampak dari program-program zakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi program-program zakat.
3. Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dapat memperluas jangkauan dan kapasitas dalam pengelolaan zakat. LSM sering memiliki akses yang lebih baik ke komunitas lokal dan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang dan melaksanakan program-program zakat yang efektif.
4. Keterlibatan sektor swasta dapat membawa inovasi, sumber daya finansial, dan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program zakat. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dapat mencakup donasi dana, pemberian bantuan teknis, atau program-program kemitraan yang lebih luas.
5. Kerja sama antara lembaga keuangan Islam dan lembaga amil zakat dapat memfasilitasi pengumpulan dana zakat secara lebih efisien. Lembaga keuangan Islam dapat membantu dalam pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi dana zakat.
6. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program zakat dapat meningkatkan relevansi, keberlanjutan, dan dampak dari program-program tersebut. Kemitraan dengan masyarakat juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan kohesi dalam komunitas.
7. Kolaborasi antar lembaga zakat di tingkat internasional dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik dalam pengelolaan zakat. Ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan zakat di berbagai negara.

Dengan memanfaatkan kemitraan dan kolaborasi yang tepat, lembaga amil zakat dapat meningkatkan efisiensi, dampak, dan keberlanjutan dari penggunaan dana zakat untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan dan memajukan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat melibatkan prinsip-prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk mengatur pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat. Dalam hukum ekonomi syariah, zakat dianggap sebagai kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Muslim yang mampu. Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam dan diatur oleh prinsip-prinsip agama Islam. Di dunia ini Allah memiliki hak-hak yaitu seperti rukun iman dan rukun islam, begitupun manusia yang memiliki hak-hak, yaitu seperti shalat dll. Zakat termasuk dalam hak campuran yakni hak Allah dan hak manusia. Dalam hak Allah zakat bersifat religius dan harta adalah hak dari manusia yang akan dikembalikan lagi ke orang miskin. Membayar zakat memiliki perintah yang religius tapi juga memiliki dimensi-dimensi sosial, seperti mengurangi kemiskinan, distribusi keadilan, membahagiakan orang dan kesejahteraan hubungan. Zakat memiliki pesan moral yang sangat banyak seperti keadilan Allah, pengembangan spiritual, kebenaran wahyu, dan redistribusi kekayaan. Beberapa dalil Al-Qur'an dan hadist tentang zakat:

1. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43).

Tafsir:

Ibnu katsir menjelaskan bahwa menurut Muqatil, *wa aqimush shalat* merupakan perintah Allah agar mereka shalat Bersama Nabi Muhammad SAW. *Wa aatuz zakat* merupakan perintah agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Sedangkan *war ka'uu ma'ar raaki'in* merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan ruku' (shalat) Bersama orang-orang yang ruku' dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW.

2. Al-Bayyinah Ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS Al-Bayyinah: 5).

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Mereka tidak diperintahkan dalam seluruh syariat Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata, mengarahkan ibadah mereka hanya kepada wajah NYA, menjauhi syirik dengan condong kepada iman, menegakan shalat dan menunaikan zakat. Itulah agama istiqamah, yaitu agama islam.

1. Hadits dari Ibnu Umar r.a.

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَيِّنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

2. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

Pandangan para ulama tentang zakat:

1. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan Sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan Sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
3. Madzhab Syafi`I, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-quran.

Hukum ekonomi syariah mengatur sumber-sumber pendapatan yang dikenai zakat, seperti harta simpanan, hasil pertanian, ternak, emas, perak, dan lain sebagainya. Objek zakat meliputi harta yang mencapai nisab (batas minimum) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan satu tahun). Ada beberapa sumber zakat yang diatur dalam hukum ekonomi syariah, yaitu: harta simpanan, hasil pertanian, ternak, emas dan perak, dan bisnis dan investasi. Objek zakat yang terkait dengan pengelolaan zakat: fakir, miskin, orang yang menderita, mustahik zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat. Ex: mereka yang baru masuk islam), dan lembaga pengelola zakat (BAZNAS).

Dalam sintesis, sumber dan objek zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat. Sumber zakat meliputi berbagai jenis harta yang dikeluarkan untuk dizakati, sedangkan objek zakat meliputi orang-orang yang berhak menerima zakat dan lembaga pengelola zakat yang berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua harta atau kekayaan dikenai zakat. Hukum ekonomi syariah menetapkan sumber dan objek zakat dengan cermat untuk memastikan bahwa zakat dikenakan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Pengelolaan zakat melibatkan pengumpulan dana zakat dari individu atau badan yang wajib membayar zakat. Pengumpulan ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga amil zakat, masjid-masjid, atau badan amal lainnya yang berwenang untuk mengelola zakat. Pengumpulan zakat dalam hukum ekonomi syariah merupakan proses yang diatur untuk mengumpulkan dana zakat dari individu atau badan yang wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan melalui lembaga amil zakat yang berwenang. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.

Lembaga amil zakat dapat menggunakan pendekatan proaktif untuk mengumpulkan zakat dengan melakukan kontak langsung dengan individu atau badan usaha yang wajib membayar zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui surat, telepon, atau pertemuan langsung. Untuk memudahkan pembayaran zakat, lembaga amil zakat biasanya menyediakan berbagai metode pembayaran yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti transfer bank, pembayaran online, atau pembayaran melalui agen-agen tertentu. Penting untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan dalam proses pengumpulan zakat. Informasi pribadi dan keuangan dari pembayar zakat harus dijaga kerahasiaannya dan sistem pembayaran harus aman dari ancaman kejahatan keuangan.

Lembaga amil zakat diharapkan memberikan laporan yang jelas dan transparan tentang pengumpulan dana zakat kepada masyarakat. Ini termasuk informasi tentang jumlah dana yang terkumpul, sumber dana, dan penggunaan dana zakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, atau lembaga amil zakat lainnya dalam mengorganisir dan

mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan. Pengumpulan zakat dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat terkumpul dengan efisien dan dipergunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi dana zakat secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Penerima zakat biasanya mencakup golongan fakir, miskin, asnaf (delapan golongan penerima zakat), mu'allaf (orang-orang yang baru masuk Islam atau simpatis dengan Islam), dan lain-lain. Dalam sintesis, distribusi yang adil dalam pembagian zakat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan solidaritas sosial. Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan lembaga yang spesifik, evaluasi yang terus-menerus, dan perbaikan yang berkelanjutan, serta semangat keadilan sosial yang mewarnai seluruh kebijakan dan tindakan operasional. ada penyimpangan terhadap zakat yang terkumpul.

Ada tiga ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku penyimpangan dalam UU Pengelolaan Zakat. Pertama, siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak mendistribusikan zakat sesuai syariah Islam. Misalnya, tidak menyalurkan kepada mustahik. Sanksinya bisa berupa pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menjaminkan, menghibahkan, mengambil zakat dengan maksud dimiliki atau perbuatan lain yang diatur dalam Pasal 37 UU Pengelolaan Zakat tersebut. Sanksinya sama dengan ketentuan pidana yang pertama tadi. Ketiga, setiap orang yang bertugas sebagai amil zakat dengan sengaja dan melawan hukum mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Ingat! Ancaman sanksi yang ketiga ini sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dapat mengancam keberadaan amil zakat atau panitia pengumpulan zakat pada masyarakat.

Salah satu tujuan pengelolaan zakat dalam hukum ekonomi syariah adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya yang membantu mereka mandiri secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam pengelolaan zakat merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima zakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara pemberdayaan ekonomi dapat diimplementasikan dalam pengelolaan zakat: pemberi modal usaha, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pendampingan, akses ke pasar, program kemitraan, pengembangan infrastruktur, dan program kewirausahaan sosial. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi pemberdayaan ekonomi dalam

pengelolaan zakat, diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.⁷

IMPLIKASI TINDAKAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Teori tindakan sosial, yang dikembangkan oleh Max Weber, dapat memiliki beberapa implikasi dalam pengelolaan zakat, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam dan kompleks seperti yang kita miliki saat ini. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat diperhatikan: Teori tindakan sosial menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana tindakan-tindakan individu terjadi. Dalam konteks zakat, ini berarti memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat. Weber membedakan antara tindakan yang berorientasi pada nilai (nilai-rasional) dan tindakan yang berorientasi pada tujuan (tujuan-rasional).

Dalam pengelolaan zakat, penting untuk memahami bahwa individu dapat memberikan zakat karena kewajiban agama (nilai-rasional) atau karena ingin mencapai tujuan sosial tertentu, seperti mengurangi kemiskinan (tujuan-rasional). Weber menyoroti peran otoritas dan kepemimpinan dalam mengarahkan tindakan sosial. Dalam pengelolaan zakat, penting bagi otoritas agama atau lembaga pengelola zakat untuk memberikan arahan yang jelas dan efektif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Weber menggambarkan birokrasi sebagai sistem administrasi yang rasional dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, prinsip-prinsip birokrasi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan zakat. Weber menyoroti pentingnya legitimasi dalam menjalankan otoritas dan kekuasaan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang mengelola zakat memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat serta menjalankan praktik-praktik yang transparan agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Weber juga mengakui bahwa tindakan sosial dapat mempengaruhi perubahan sosial. Dalam pengelolaan zakat, tindakan-tindakan seperti meningkatkan akses pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi para mustahik (mereka yang berhak menerima zakat) dapat membantu dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Dengan mempertimbangkan implikasi teori tindakan sosial dalam pengelolaan zakat, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas zakat dapat lebih baik dalam merancang kebijakan dan praktik-praktik yang memperhitungkan kompleksitas masyarakat serta memaksimalkan dampak positif dari pengelolaan zakat.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2002).

KESIMPULAN

Dalam konteks pengelolaan zakat, tindakan sosial memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan sosial dalam pengelolaan zakat tidak hanya mencakup pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh proses tersebut. Pengelolaan zakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan dari sumber yang halal dan disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini melibatkan transparansi yang tinggi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas terhadap masyarakat, dan pengawasan independen untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemberdayaan ekonomi juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan lainnya kepada masyarakat penerima zakat agar dapat mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membantu menciptakan kesempatan yang berkelanjutan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam kesimpulannya, tindakan sosial dalam pengelolaan zakat dari perspektif hukum ekonomi syariah memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam, pengelolaan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharsyah Ibrahim. "Azharsyah Ibrahim. (2011). Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Syariah*." (2011).
- D R I B Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Jakarta: kencana, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, and Budi Handrianto. *Agar harta berkah dan bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Maulana, Andri, and Rio Laksamana. "Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (n.d.).
- Ridlo, Ali,. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: *Jurnal Al-'Adl*," 6, no. 2 (2013): 5.
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, n.d.